

The Effectiveness of the Infrastructure Development Program as an Effort to Improve Public Services

[Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik]

Andita Apriliyah¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the Village Infrastructure Development Program as an effort to improve public services in Kalipecabean Village. This research employed a descriptive method with a qualitative approach and was conducted at the Kalipecabean Village Government. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while the sampling technique used was purposive sampling. The informants consisted of the Village Secretary, Treasurer, and Head of the Welfare Section (Kasi Kesra) of Kalipecabean Village. The data were analyzed using Richard M. Steers' theory of organizational effectiveness, which includes three indicators: goal achievement, integration, and adaptation. Regarding the goal achievement indicator, most infrastructure development projects have been successfully realized and have provided benefits to the community, although the Integrated Waste Management Facility (TPST) has not yet been operational, resulting in its benefits not being fully realized. Regarding the integration indicator, the village government has carried out communication, coordination, and socialization with various stakeholders through the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes); however, several development activities have not been implemented in accordance with the planning documents due to budget limitations and technical constraints. Regarding the adaptation indicator, the village government has been able to adjust the implementation of development programs to actual conditions in the field, supported by adequate human resources and infrastructure. Therefore, the Village Infrastructure Development Program has contributed to improving public services in Kalipecabean Village, although further improvements are still needed, particularly in optimizing the utilization of development outcomes and ensuring greater alignment between program planning and implementation.*

Keywords - Effectiveness; Village Development; Public Services

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Desa sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Desa Kalipecabean. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Pemerintah Desa KenKali Pecabea. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Informan dalam penelitian ini yaitu Skretrais, Bendahara dan Kasi kesra Desa Kalipecabean, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers yang meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan, sebagian besar pembangunan infrastruktur telah terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum beroperasi sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal. Pada indikator integrasi, pemerintah desa telah melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan karena keterbatasan anggaran dan kendala teknis. Pada indikator adaptasi, pemerintah desa mampu menyesuaikan pelaksanaan pembangunan dengan kondisi di lapangan serta didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Dengan demikian, Program Pembangunan Infrastruktur Desa telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Kalipecabean, meskipun masih diperlukan peningkatan pada pemanfaatan hasil pembangunan dan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program.*

Kata Kunci - Efektivitas; Pembangunan Desa; Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peran sentral dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai kawasan permukiman masyarakat, desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Desa merupakan sebuah komunitas sosial dan bentuk pemerintahan lokal yang telah ada sejak jauh sebelum terbentuknya Indonesia [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat desa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem NKRI. Pengaturan mengenai kelembagaan desa, yang meliputi pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat desa, turut memperkuat posisi strategis desa dalam sistem pemerintahan.

Sebagai organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan, pembangunan desa dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan memperhatikan pencapaian kebutuhan dasar, seperti pengembangan infrastruktur di desa, optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Pada umumnya pembangunan infrastruktur di desa merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahap pembangunan. Salah satu instrument penting dalam pembangunan yang wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenihnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat utama adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur di desa juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomin masyarakat desa, seperti dengan adanya listrik yang memadai, lahirnya industri kecil dan menengah di desa, dan membuka lapangan kerja baru.

Pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa juga memiliki tantangan, seperti perencanaan yang berdimensi jangka pendek dan rendahnya rasa memiliki masyarakat desa yang menganggap prioritas manfaat dana desa adalah adanya cash yang diterima. Perencanaan yang berdimensi jangka pendek pembangunan infrastruktur desa sering kali dilakukan dengan perencanaan yang berfokus pada jangka pendek, sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal. Sense of belonging masyarakat desa sering menganggap bahwa prioritas manfaat dana desa adalah adanya cash yang diterima, sehingga tidak memperhatikan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun secara optimal.

Pelayanan publik mencerminkan kepercayaan publik, pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sesuai melalui keterbukaan dan pengelolaan yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan integritas di mata masyarakat dan untuk mewujudkan legitimasi publik. Di Indonesia kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan publik semakin menjadi perhatian karena cenderung tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Padahal, dampaknya sangat luas mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya [2]. Pelayanan tersebut dapat berupa regulasi maupun berbagai bentuk pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik [3]. Pelayanan publik dapat dianggap berkualitas jika memenuhi beberapa kriteria diantaranya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kepastian hukum. Pelayanan publik ini mencakup aspek pemenuhan fasilitas umum, penyelenggaraan pendidikan, penanganan masalah sosial, layanan kependudukan, administrasi sipil, isu ketenagakerjaan, dan layanan dasar lainnya. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan salah satunya melalui pembangunan desa.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa di laksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong [4]. Selanjutnya pasal 82 undang-undang desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit (satu) tahun sekali, masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu unsur penting dalam penunjang kemajuan desa. Ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur sangat berpengaruh pada keterbatasan masyarakat desa dalam berkomunikasi, produksi dan mengakses informasi terutama dalam menunjang kebutuhan masyarakat desa [5].

Tujuan dalam pembangunan perdesaan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan perdesaan jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam atau dapat di rumuskan pembangunan perdesaan di tunjukan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berperan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan [6]. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan pada bidang ekonomi serta kemampuan usaha secara berkesinambungan tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat indonesia secara keseluruhan [7].

Pembangunan diwilayah perdesaan, tentunya ada beberapa jenis pembangunan, yang terdiri dari pembangunan fisik dan non-fisik atau dengan kata lain dari segi pembangunan fisik dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), serta pembangunan dari segi sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan program infrastruktur desa di indonesia menggunakan dana desa telah menunjukkan beberapa hasil positif. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jembatan, serta sarana dan prasarana desa. Keberhasilan infrastruktur menggunakan dana desa dapat dilihat dari beberapa faktor seperti, Pengembangan sumber daya manusia, pemerintah desa melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa, termasuk keterampilan pertanian, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Pengelolaan dana desa yang efektif, pemerintah desa harus berupaya untuk mengelola dana desa secara efektif dan transparan. Partisipasi masyarakat, masyarakat desa harus aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa.

Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki fokus pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur fisik Desa Kalipecabean saat ini dicirikan oleh program pembangunan dan peningkatan kualitas aksesibilitas jalan lingkungan yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pembenahan jaringan jalan pemukiman melalui program pavingisasi, drainase, infrastruktur olah raga, pengelolaan sampah, dan Kios BUMDesa. Berikut merupakan data pembangunan infrastruktur Desa Kalipecabean Tahun 2023-2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pembangunan Infrastruktur Desa Kalipecabean Tahun 2023-2025

No	Tahun	Program/Kegiatan	Anggaran	Prosentase Realisasi Anggaran	Total Anggaran
1	2023	Pembangunan Paving jalan RT 03 RW 01	Rp 50.000.000,00	88,02%	Total Anggaran Tahun 2023 Rp. 677.338.220,-
2		Pembangunan Paving Jalan RW 06	Rp 25.000.000,00		
3		pembangunan saluran pembuangan RT 18 RW 04	Rp 70.940.410,00		
4		pembangunan gorong-gorong RT.15 RW 04	Rp 20.000.000,00		
5		Pembangunan gorong-gorong RT 05 RW 02	Rp 16.000.000,00		
6		Pembangunan balai RW 5	Rp 251.397.810,00		
7		Pembangunan Kantor SSB Pendowo	Rp 50.000.000,00		
8		Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Rp 50.000.000,00		
9	2024	Pembangunan kios desa	Rp 144.000.000,00	84,15%	Total Anggaran Tahun 2024 Rp. 878. 919.960,-
10		Pemeliharaan Pendopo Balai Desa	Rp 139.269.500,00		
11		Pembangunan Pavingisasi Jalan Gang RT 06 RW 02	Rp 46.580.000,00		
12		Pembangunan Pavingisasi jalan RT 13 RW 03	Rp 19.676.900,00		
13		Pembangunan Drainase RT 13 Rw 03	Rp 27.762.500,00		
14		Pembangunan Drainase RT 16 RW 04	Rp 23.328.500,00		
15		Pembangunan Drainase RT 06 RW 02	Rp 17.233.000,00		

16	Pembangunan Drainase RT 05 RW 02	Rp	10.000.000,00		
17	Pembangunan Drainase Kios Desa	Rp	9.825.750,00		
18	Pembangunan balai RW 5	Rp	251.397.810,00		
19	Pembangunan WC Umum/MCK umum	Rp	11.326.000,00		
20	Pembangunan Tungku Pembakaran Sampah	Rp	98.220.000,00		
21	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Rp	50.000.000,00		
22	Pembangunan kios desa	Rp	174.300.000,00		
23	Pembangunan Paving Rt 01 Rw 01	Rp	34.355.000,00		
24	Peninggian Paving Rt 02 Rw 01	Rp	22.300.000,00		
25	Peninggian Paving Rt 06 Rw 02	Rp	38.059.000,00		
26	Pembangunan Paving Rt 10 Rw03	Rp	93.883.000,00		
27	Peninggian Paving Rt 10 Rw 03	Rp	64.983.000,00		
28	Peninggian Paving Rt 13 Rw 03	Rp	28.225.000,00		
29	Pembangunan Paving Rt 15 Rw 04	Rp	35.964.000,00		
30	2025 Peninggian Paving Rt 15 Rw 04	Rp	70.017.000,00	86,02%	Total Anggaran Tahun 2025
31	Peninggian Paving Rt 16 Rw 04	Rp	198.822.000,00		Rp. 945. 664. 626,-
32	Rehab Balai Desa	Rp	108.270.654,00		
33	Peninggian Jalan Rt 10,13 Rw 03	Rp	78.704.222,00		
34	Pembangunan Paving Rt 10 Rw 03	Rp	66.000.000,00		
35	Peninggian Paving Rt 13 Rw 03	Rp	79.106.750,00		
36	Rehab Balai Rw 03	Rp	10.000.000,00		
37	Rehab Drainase Rt 12 Rw 03	Rp	7.175.000,00		
38	Normalisasi Saluran Air Rt 01,02,03,04 Rw 01 dan Rt 05 Rw 02	Rp	9.800.000,00		

Sumber : Pemerintah Desa Kalipecabean, 2025

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari tahun 2023 hingga 2025 jumlah program pembangunan infrastruktur Desa Kalipecabean jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat satu program yang belum terrealisasikan yaitu pembangunan balai RW 5 dikarenakan belum mendapatkan izin dari dinas terkait. Sehingga dari tahun 2023 hingga saat ini masih belum dapat terproses sebagaimana mestinya. Jumlah anggaran pada setiap tahunnya mengalami peningkatan hal tersebut mencerminkan bahwa di Desa Kendalpecabean terus mengembangkan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Pada observasi awal penulis menjumpai beberapa permasalahan terkait efektivitas program pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Pertama, pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa. Kedua, terdapat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang telah selesai dibangun namun hingga saat ini belum beroperasi sehingga manfaatnya bagi masyarakat belum dapat dirasakan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan, sehingga perlu dilakukan kajian untuk menguji apakah program pembangunan infrastruktur desa telah berjalan secara efektif atau belum.

Dalam mengkaji terkait Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik keberadaan teori sangat diperlukan sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut M. Richard Strees. Efektivitas menyatakan bahwa sebenarnya memusatkan perhatian pada tingkah laku organisasi sewaktu berjuang mencapai posisi tawar menawar yang menguntungkan dalam lingkungan luarnya Indikator efektivitas mengatakan mengenai ukuran efektivitas menurut M. Richard Strees, sebagai berikut yakni a) Pencapaian Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal. Tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. b) Integrasi pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan consensus di tengah masyarakat, dan c) Adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan. Dengan demikian, digunakan tolak ukur berupa kesediaan petugas dan sarana prasarana [8].

Berdasarkan permasalahan diatas, keberadaan penelitian terdahulu menjadi hal yang penting. Pertama, penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid-19” Oleh Helena Afriani Rama Tahun 2022 dijumpai hasil pembangunan infrastruktur yang ada di desa goreng meni kecamatan lamba leda kabupaten manggarai timur jika dilihat dari 3 indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan

dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan sudah tepat sasaran. tetapi belum terlalu efektif, mungkin karena kendala covid-19, untuk indikator yang kedua yaitu integrasi dimana program tersebut sudah di sosialisasikan kemasyarakat desa goreng meni, kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaan di lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya. Pembangunan di desa goreng meni bisa dikatakan lumayan efektif karena dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, pembangunan sudah lumayan meningkat antara lain akses jalan, transportasi juga meningkat karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada infrastruktur jalan terlebih dahulu sehingga pada tahap selanjutnya bisa berjalan lancar tanpa menjadikan akses jalan sebagai kendala yang selama ini di jadikan permasalahan [9].

Kedua, penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro” Oleh Yuliani Mangerongkonda Tahun 2023 dijumpai hasil efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dari pencapaian tujuan : dari hasil yang di dapatkan di lapangan berdasarkan indikator pencapaian tujuan belum mencapai tujuan karna masalah yang timbul akibat transparasinya anggaran dan program pemerintah yang belum semuanya yang terealisasi dengan baik dan benar. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dari tingkat kepuasan : maka tingkat kepuasan dari masyarakat yang masih kurang akibat ketidaktransparannya pemerintah terhadap anggaran program pembangunan infrastruktur desa [10].

Ketiga, Penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Mamuju” Oleh Putri Tahun 2023 dijumpai hasil Pelaksanaan program pembangunan di Desa Bonehau Kabupaten Mamuju dikategorikan efektif sebab empat tahun belakangan ini, pembangunan sudah meningkat, antara lain akses transportasi, fasilitas pendidikan dan serta infrastruktur lainnya, karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada urgensi dari kebutuhan infrastruktur masyarakat itu sendiri [11].

Keempat, Penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo “ oleh Arik Atus Solikah dan Isna Fitria Agustina tahun 2025 dijumpai hasil efektivitas dana desa terhadap pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo sudah dikategorikan sangat efektif menunjukkan bahwa dana desa yang teralokasi untuk terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan target. Dari hasil kuisioner responden menunjukkan bahwa dana desa dapat berefek secara langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo. Adanya pemanfaatan dana desa yang maksimal dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa dapat menekan angka kemiskinan, terlaksananya berbagai pembangunan dan pembaharuan fasilitas desa dan masyarakat yang dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat desa [12]. Tujuan dari penelitian saat ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik.

II. METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian menggunakan deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman informan [13]. Lokasi penelitian berada di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalipecabean setiap tahunnya mengalami peningkatan. Fokus utama penelitian adalah pada teori Efektivitas Pembangunan Infrastruktur menurut Richard M. Steers dengan indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan percakapan dengan individu yang terlibat dalam Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur. Sedangkan Sumber Data Sekunder mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, dan situs web yang berhubungan langsung dengan penelitian efektivitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu [14]. Berdasarkan kebutuhan spesifik, dapat memberikan wawasan tentang masalah yang ditemui selama penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Bendahara, Kasi Kesra serta masyarakat penerima manfaat di Desa Kalipecabean. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumen pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yaitu Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi empat langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. 2) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [15].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, yang mana diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber data dan informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan efektivitas program menurut Richard M. Steers dengan beberapa indikator yakni a) Pencapaian Tujuan, b) Integrasi, dan 3) Adaptasi sebagai berikut :

A. Pencapaian Tujuan

Tujuan merupakan kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok melalui pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan. Tujuan mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan nilai dan harapan para pelaksana. Selain itu, tujuan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan serta pelaksanaan program dan berbagai aktivitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi. Dalam suatu program, kejelasan tujuan menjadi faktor yang sangat penting karena efektivitas pelaksanaan program dapat dinilai dari sejauh mana tujuan yang telah direncanakan mampu diwujudkan sesuai dengan pelaksanaannya.

Efektivitas memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Richard M. Steers, pencapaian tujuan merupakan keseluruhan proses yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran program secara bertahap, baik melalui penyelesaian setiap tahapan kegiatan maupun berdasarkan periodisasi pelaksanaan yang telah direncanakan. Dengan demikian, pencapaian tujuan tidak hanya dilihat dari hasil akhir suatu kegiatan, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, hasil yang diperoleh, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur desa untuk menunjang kegiatan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan salah satu misi Desa Kalipecabean, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur desa untuk menunjang kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki keterkaitan dengan misi desa untuk meningkatkan pelayanan publik agar cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat, karena tersedianya infrastruktur yang memadai dapat mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan pelayanan di desa.

Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Salah satunya adalah pembangunan jalan lingkungan melalui pavingisasi. Pavingisasi merupakan salah satu hasil pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kondisi jalan, mempermudah mobilitas, dan menunjang aktivitas sehari-hari. Selain pavingisasi, pembangunan infrastruktur juga mencakup berbagai fasilitas lainnya, seperti drainase, fasilitas umum, serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Oleh karena itu, pencapaian tujuan program dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari satu jenis pembangunan, tetapi dari keseluruhan hasil pembangunan infrastruktur dan sejauh mana hasil tersebut mampu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Pencapaian tujuan Program Pembangunan Infrastruktur Desa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, ketercapaian hasil pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Kesesuaian dengan perencanaan dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada APBDes dan hasil musyawarah desa. Sementara itu, ketercapaian hasil dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang telah selesai dan dapat digunakan oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan dan manfaat pembangunan dapat dilihat dari adanya peningkatan aksesibilitas, kemudahan mobilitas, dukungan terhadap kegiatan ekonomi, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas dan pelayanan publik.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maskup Murdiono, S.AP selaku Sekretaris Desa Kalipecabean sebagai berikut:

“Secara umum tujuan program sudah mulai tercapai. Hal itu terlihat dari semakin baiknya kondisi jalan lingkungan, drainase, dan beberapa fasilitas umum yang sudah dimanfaatkan masyarakat. Akses masyarakat menjadi lebih mudah dan pelayanan pemerintah desa juga lebih didukung oleh fasilitas yang lebih baik. Meskipun begitu, kami mengakui masih ada beberapa program yang belum berjalan optimal sehingga masih perlu penyempurnaan. Kami melihat dari hasil fisik pembangunan apakah sudah selesai sesuai perencanaan, kemudian apakah fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Selain itu kami juga menerima masukan dari masyarakat saat musyawarah maupun secara langsung untuk mengetahui apakah pembangunan tersebut sudah memberikan manfaat.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean telah terlihat dari semakin baiknya kondisi beberapa infrastruktur yang telah dibangun. Perbaikan jalan lingkungan melalui pavingisasi, pembangunan drainase, serta fasilitas umum telah memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Khususnya pada pembangunan pavingisasi, kondisi jalan yang lebih baik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas dan mengakses berbagai fasilitas di lingkungan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan tidak hanya berupa keluaran fisik, tetapi telah memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembangunan infrastruktur desa.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya proses evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Pemerintah desa tidak hanya melihat apakah pembangunan telah selesai secara fisik, tetapi juga memperhatikan apakah hasil pembangunan benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan. Masukan yang diperoleh melalui musyawarah desa maupun penyampaian secara langsung menjadi salah satu cara pemerintah desa mengetahui kebermanfaatan pembangunan. Kondisi tersebut sesuai dengan indikator pencapaian tujuan Richard M. Steers karena pencapaian tujuan tidak berhenti pada penyelesaian kegiatan, tetapi mencakup keberhasilan hasil pembangunan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Feni Sandra, S.AP selaku Bendahara Desa Kalipecabean sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean, kami mengelola anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan hasil musyawarah desa. Setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Kami juga melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran agar setiap pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. Dengan tercapainya pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan, kami berharap pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, baik dari segi aksesibilitas maupun pemanfaatan fasilitas umum.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan program juga didukung oleh pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada perencanaan dalam APBDes dan hasil musyawarah desa. Pembangunan berdasarkan skala prioritas menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan juga dilakukan agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, dan hasil yang diperoleh sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan program.

Salah satu bentuk pembangunan yang menunjukkan adanya manfaat nyata bagi masyarakat adalah pembangunan jalan melalui pavingisasi. Pembangunan tersebut memberikan perubahan terhadap kondisi jalan lingkungan sehingga menjadi lebih baik dan lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Pavingisasi juga mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi dan akses menuju fasilitas umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telah memberikan manfaat yang sesuai dengan misi Desa Kalipecabean untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desa dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan manfaat terhadap mobilitas, kondisi jalan yang lebih baik melalui pavingisasi juga dapat mendukung pelayanan publik. Infrastruktur jalan yang memadai mempermudah masyarakat dalam mengakses kantor desa, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, maupun fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan misi Desa Kalipecabean untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur tidak hanya dirasakan dalam bentuk perubahan kondisi fisik, tetapi juga melalui kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan memperoleh pelayanan. Berikut merupakan dokumentasi Pembangunan pavingisasi di Desa Kalipecabean sebagai berikut :

Sumber: Pemerintah Desa Kalipecabean, 2026
Gambar 1. Dokumentasi Pavingisasi Desa Kalipecabean

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kalipecabean telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya melalui pembangunan jalan lingkungan dengan pavingisasi. Pembangunan pavingisasi telah memperbaiki kondisi jalan sehingga masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam melakukan mobilitas serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program tidak hanya dilihat dari terselesainya pembangunan secara fisik, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maskup Murdiono, S.AP selaku Sekretaris Desa Kalipecabean sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kalipecabean secara umum sudah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan jalan lingkungan dengan pavingisasi yang membuat kondisi jalan menjadi lebih baik, sehingga masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam melakukan mobilitas serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami melihat keberhasilan pembangunan tidak hanya dari apakah pembangunan tersebut sudah selesai secara fisik, tetapi juga dari apakah hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk pembangunan lainnya seperti TPST, secara fisik memang sudah selesai, tetapi masih dalam tahap persiapan operasional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami terus melakukan persiapan agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan desa.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Arik Susanto selaku Kasi Kesra Desa Kalipecabean sebagai berikut:

“Secara umum, pembangunan infrastruktur sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Pavingisasi jalan lingkungan membuat kondisi jalan lebih baik sehingga memudahkan mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, TPST sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi karena masih dalam tahap persiapan. Berdasarkan masukan masyarakat, sebagian besar merasa puas terhadap hasil pembangunan, meskipun masih ada harapan agar TPST segera dioperasikan dan pembangunan lainnya terus ditingkatkan.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian indikator pencapaian tujuan dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean dapat ditunjukkan oleh terealisasinya pembangunan infrastruktur berdasarkan perencanaan dan skala prioritas desa serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung adalah pavingisasi jalan lingkungan. Pembangunan pavingisasi telah memperbaiki kondisi jalan sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan menunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut sejalan dengan misi Desa Kalipecabean untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desa guna menunjang kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik. Namun, pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pembangunan yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, yaitu TPST. Fasilitas tersebut telah selesai dibangun secara fisik, tetapi belum beroperasi karena masih dalam tahap persiapan operasional. Sementara itu, pembangunan pavingisasi telah dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pencapaian tujuan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean telah tercapai pada sebagian besar pembangunan, tetapi masih diperlukan penyelesaian pada fasilitas yang belum beroperasi agar seluruh hasil pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan Richard M. Steers, Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean telah menunjukkan pencapaian tujuan melalui terealisasinya pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat. Pavingisasi menjadi salah satu bentuk pembangunan yang telah memberikan manfaat berupa perbaikan kondisi jalan, kemudahan mobilitas, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Adapun TPST yang belum beroperasi menunjukkan bahwa masih terdapat bagian dari tujuan program yang belum tercapai secara optimal.

B. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam membangun sosialisasi, menjalin komunikasi yang efektif, serta mengembangkan kesepahaman atau konsensus di tengah masyarakat. Melalui integrasi yang baik, organisasi dapat menciptakan koordinasi yang harmonis dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan [17]. Indikator integrasi berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait selama proses pelaksanaan program. Sosialisasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan suatu program karena dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kesepahaman masyarakat terhadap tujuan serta manfaat yang ingin dicapai. Dalam penelitian mengenai efektivitas program pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, sosialisasi memiliki peran yang penting untuk memastikan masyarakat memahami rencana dan pelaksanaan pembangunan, sehingga tercipta koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan infrastruktur.

Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti rapat, koordinasi, maupun bentuk komunikasi lainnya yang melibatkan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi tidak selalu berjalan secara optimal. Pada beberapa program, masih terdapat kendala karena sasaran program belum sepenuhnya memahami tujuan, mekanisme, maupun manfaat dari program yang dilaksanakan, sehingga efektivitas pelaksanaan program belum dapat tercapai secara maksimal [18]. Integrasi merupakan indikator yang digunakan untuk

mengukur kemampuan suatu organisasi dalam membangun sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian mengenai efektivitas program pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, integrasi tercermin dari kemampuan pemerintah desa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Integrasi yang baik akan memperkuat kesamaan pemahaman, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maskup Murdiono, S.AP selaku Sekretaris Desa Kalipecabean sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa, kami selalu mengutamakan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan, kami mengadakan musyawarah desa yang melibatkan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, RT/RW, dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan rencana pembangunan serta menyerap usulan dan kebutuhan warga. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun instansi terkait apabila terdapat pembangunan yang memerlukan dukungan atau pendampingan teknis. Selama proses pembangunan berlangsung, komunikasi tetap dilakukan agar apabila terdapat kendala di lapangan dapat segera dicarikan solusi bersama. Melalui sosialisasi dan koordinasi yang baik, masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya, serta turut mengawasi agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Kalipecabean.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Feni Sandra, S.AP Selaku Bendahara Desa Kalipecabean sebagai berikut :

“Dari sisi pengelolaan anggaran, kami juga selalu melakukan koordinasi dengan kepala desa, sekretaris desa, Kaur Perencanaan, TPK, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan diawali dengan pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dan disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama. Selama proses pelaksanaan, komunikasi terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana serta apabila terdapat perubahan atau kendala di lapangan dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran melalui forum desa sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Kalipecabean.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek integrasi dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kalipecabean telah berjalan. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi, koordinasi, dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dengan berbagai pihak, mulai dari perangkat desa, BPD, pemerintah kecamatan, hingga masyarakat. Selain itu, koordinasi dalam pengelolaan anggaran juga dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik tersebut, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta mampu mendukung peningkatan pelayanan publik di Desa Kalipecabean. Berikut merupakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUESRENBANGDES) Tahun 2025 sebagai berikut



Sumber : Pemerintah Desa Kalipecabean, 2026

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan MUESRENBANGDES Tahun 2025

Berdasarkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Kalipecabean, dapat diketahui bahwa yang dihadiri oleh masyarakat dan pihak pemerintah desa sebagai forum untuk membahas pembangunan desa. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses pembangunan infrastruktur desa, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Kalipecabean berperan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, menyusun rencana berdasarkan kondisi dan prioritas desa, serta melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa untuk menyampaikan usulan dan menentukan pembangunan yang dibutuhkan. Masyarakat berperan menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, serta menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan, termasuk kebutuhan pembangunan jalan melalui pavingisasi. Selanjutnya, BPD berperan dalam menampung aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pada tahap penganggaran dan pelaksanaan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran melalui APBDes, sedangkan pelaksana pembangunan bertugas merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana, anggaran, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan memberikan tanggapan terhadap hasilnya. Dengan demikian, gambar tersebut menggambarkan proses partisipatif dalam pembangunan infrastruktur Desa Kalipecabean, di mana pemerintah desa, BPD, pelaksana pembangunan, dan masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan mulai dari perencanaan, penetapan prioritas, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maskup Murdiono, S.AP selaku Sekretaris Desa Kalipecabean sebagai berikut :

“Musrenbangdes merupakan tahapan yang selalu kami laksanakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di Desa Kalipecabean. Dalam forum tersebut, kami mengundang BPD, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, lembaga desa, serta perwakilan masyarakat untuk menyampaikan usulan sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Seluruh usulan yang masuk kami bahas bersama dan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan desa. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan pada tahun yang sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, adanya perubahan prioritas pembangunan, maupun kondisi teknis di lapangan yang mengharuskan pemerintah desa melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, usulan yang belum dapat dilaksanakan akan kami evaluasi dan diprioritaskan kembali pada Musrenbangdes berikutnya agar tetap dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Feni Sandra, S.AP Selaku Bendahara Desa Kalipecabean sebagai berikut :

“Dari sisi anggaran, seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur mengacu pada hasil Musrenbangdes dan dokumen perencanaan desa. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan adanya perubahan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kami selalu berkoordinasi dengan kepala desa, sekretaris desa, dan TPK agar penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan akan dievaluasi dan diusulkan kembali pada perencanaan tahun berikutnya.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator integrasi dalam efektivitas program pembangunan infrastruktur di Desa Kalipecabean dapat terlihat dari adanya sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi yang dilakukan pemerintah desa dengan BPD, perangkat desa, pemerintah kecamatan, TPK, serta masyarakat melalui forum Musrenbangdes. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers yang menyatakan bahwa integrasi merupakan kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi, sosialisasi, dan konsensus dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Namun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan desa karena adanya keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, dan kendala teknis di lapangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro yang menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas program pembangunan infrastruktur, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala sehingga belum seluruh rencana pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.

C. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi dan perubahan lingkungan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu program. Menurut Richard M. Steers, adaptasi berkaitan dengan kemampuan

organisasi untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi yang terjadi agar tujuan yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai. Dalam penelitian ini, indikator adaptasi tidak hanya dilihat dari proses pembangunan, tetapi juga dari kemampuan Pemerintah Desa Kalipecabean dalam menyesuaikan dan menindaklanjuti kondisi setelah pembangunan infrastruktur dilaksanakan. Penyesuaian tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam memantau kondisi infrastruktur yang telah dibangun, menerima masukan masyarakat, melakukan pemeliharaan atau perbaikan apabila terjadi kerusakan, serta menyesuaikan pembangunan berikutnya dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah pembangunan infrastruktur dilaksanakan, pemerintah desa perlu memastikan bahwa hasil pembangunan dapat digunakan dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan lingkungan melalui pavingisasi, misalnya, telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mempermudah mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan agar apabila terdapat kerusakan atau perubahan kebutuhan masyarakat, pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian melalui pemeliharaan maupun pembangunan lanjutan. Dengan demikian, adaptasi dalam program pembangunan infrastruktur tidak berhenti setelah pembangunan selesai, tetapi berlanjut pada kemampuan pemerintah desa dalam menjaga kebermanfaatan hasil pembangunan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maskup Murdiono, S.AP selaku Sekretaris Desa Kalipecabean sebagai berikut:

“Setelah pembangunan selesai, kami tetap melihat kondisi infrastruktur yang sudah dibangun dan menerima masukan dari masyarakat. Kalau ada jalan atau fasilitas yang mengalami kerusakan atau masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, kami akan memasukkannya sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pembangunan berikutnya. Untuk pavingisasi yang sudah dimanfaatkan masyarakat, kami juga melihat kondisi jalannya agar tetap dapat digunakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi Pemerintah Desa Kalipecabean terlihat dari adanya pemantauan terhadap kondisi infrastruktur setelah pembangunan selesai serta keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Hasil pembangunan tidak hanya dibiarkan setelah selesai, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan pemeliharaan maupun pembangunan selanjutnya. Pavingisasi yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat juga perlu dipantau agar kondisinya tetap dapat mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sugianto selaku masyarakat Desa Kalipecabean sebagai berikut:

“Setelah pembangunan selesai, pemerintah desa masih memperhatikan kondisi jalan dan fasilitas yang sudah dibangun. Kalau ada bagian yang rusak atau ada kebutuhan lain, masyarakat bisa menyampaikan kepada pemerintah desa. Menurut saya, pemerintah desa cukup terbuka terhadap masukan warga sehingga pembangunan berikutnya bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.” (wawancara, 09 Juli 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, adaptasi setelah pembangunan terlihat dari adanya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengetahui kondisi infrastruktur yang telah direalisasikan. Masukan masyarakat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah desa untuk melakukan evaluasi dan menentukan tindak lanjut pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan menjadi dasar dalam menyesuaikan kebijakan dan pembangunan berikutnya dengan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Selain pemantauan dan evaluasi, adaptasi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menindaklanjuti fasilitas yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah TPST Desa Kalipecabean yang telah selesai dibangun tetapi belum beroperasi. Kondisi tersebut membutuhkan penyesuaian lanjutan berupa persiapan sarana pendukung, peralatan, mekanisme pengelolaan, dan petugas agar fasilitas dapat berfungsi sesuai tujuan pembangunan. Dengan demikian, kemampuan pemerintah desa dalam menyelesaikan tahapan setelah pembangunan menjadi bagian dari adaptasi untuk memastikan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator adaptasi dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Kalipecabean dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan tindak lanjut pembangunan berdasarkan kondisi infrastruktur setelah direalisasikan, melakukan pemantauan, menerima masukan masyarakat, serta menjadikan kondisi hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk pembangunan berikutnya. Pavingisasi yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat menunjukkan bahwa hasil pembangunan dapat digunakan sesuai kebutuhan, sedangkan pemantauan dan pemeliharaan diperlukan agar manfaat tersebut dapat dipertahankan. Di sisi lain, TPST yang belum beroperasi menunjukkan masih adanya kebutuhan penyesuaian dan tindak lanjut agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut sesuai dengan indikator adaptasi Richard M. Steers yang menekankan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar tujuan program dapat terus tercapai. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Mamuju”*

yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi di lapangan, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Desa sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Kalipecabean, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara keseluruhan telah berjalan berdasarkan tiga indikator efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pertama, pada indikator pencapaian tujuan, program telah mampu merealisasikan berbagai pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan dan skala prioritas desa. Salah satu hasil pembangunan yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat adalah pavingisasi jalan lingkungan yang memperbaiki kondisi jalan, mempermudah mobilitas, dan menunjang aktivitas masyarakat. Namun, masih terdapat fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu TPST yang telah selesai dibangun tetapi belum beroperasi karena masih dalam tahap persiapan operasional. Kedua, pada indikator integrasi, pemerintah desa telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan melalui musyawarah desa serta koordinasi dengan BPD, perangkat desa, pemerintah kecamatan, TPK, dan masyarakat. Keterlibatan tersebut mendukung penyusunan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal karena keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, dan kendala teknis. Ketiga, pada indikator adaptasi, pemerintah desa menunjukkan kemampuan menyesuaikan hasil dan tindak lanjut pembangunan dengan kondisi setelah pelaksanaan melalui pemantauan kondisi infrastruktur, menerima masukan masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pemeliharaan dan pembangunan berikutnya. Pavingisasi yang telah dimanfaatkan masyarakat menjadi salah satu hasil pembangunan yang terus diperhatikan kondisinya, sedangkan TPST masih memerlukan penyesuaian dan kesiapan operasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya keluarga, Pimpinan dan Pegawai Desa Kalipecabean tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] A. Suprianto and Syafhendry, “Wewenang kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,” *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, vol. 2, pp. 14, 2016.
- [2] A. Mahsyar, “Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik,” *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 2, pp. 81–90, 2011, doi: 10.26618/ojip.v1i2.22.
- [3] E. Wahyuni, N. M. Afistha, and E. R. Nawangsari, “Model peningkatan pelayanan publik pada instansi pemerintah di Indonesia,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2020.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, 2014.
- [5] Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 1st ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2011.
- [6] D. Willar, *Penerapan Konstruksi Berkelanjutan pada Pembangunan Infrastruktur*. Manado, Indonesia: Polimdo Press, 2019.
- [7] N. B. Srihardjono, “Hubungan antara pembangunan infrastruktur dan kemampuan usaha masyarakat,” *Jurnal Reformasi*, vol. 9, no. 2, 2019.
- [8] R. M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, trans. M. Jamin. Jakarta, Indonesia: Erlangga, 2005.
- [9] H. A. Rama and E. W. Endarti, “Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur selama masa pandemi COVID-19,” *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, vol. 2, no. 3, 2022.
- [10] Y. Mangerongkonda *et al.*, “Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur selama masa pandemi COVID-19,” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5, no. 74, 2023.
- [11] F. Putri, “Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Mamuju,” 2023.

- [12] A. T. Solikah and I. F. Agustina, “Efektivitas dana desa terhadap pembangunan di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo,” 2025. [Online]. Available: Archive.Umsida.ac.id.
- [13] P. S. Rahmat, “Penelitian kualitatif,” *Jurnal Equilibrium*, vol. 5, no. 9, pp. 1–8, 2009.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2011.
- [15] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2014.
- [16] S. Yunengsih and Syahrilfuddin, “The analysis of giving rewards by the teacher in learning mathematics grade 5 students of SD Negeri 184 Pekanbaru,” *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, vol. 4, no. 4, p. 715, 2020, doi: 10.33578/pjr.v4i4.8029.
- [17] C. N. Sari, M. Heriyanto, and Z. Rusli, “Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga,” *Program Studi Magister Ilmu Administrasi*, pp. 135–141, 2018.
- [18] Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, “Pembangunan desa (studi kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung),” Universitas Diponegoro, 2017.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.